

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang paling esensial di wilayah kesatuan Indonesia adalah pemerintahan desa. Pemerintah desa mengambil bagian penting dalam administrasi dan pelaksanaan desa. Memberikan bantuan sosial yang berkualitas untuk membantu masyarakat setempat dalam mencapai perkembangan, ketenangan, dan keharmonisan adalah kewajiban penting pemerintah desa dalam memajukan kehidupan masyarakat. Administrasi dan pengelolaan daerah setempat adalah kewajiban pemerintah desa. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.¹

Di Sumatera Barat, pemerintah desa disebut sebagai pemerintah nagari. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2007 tentang Pemerintahan/Nagari, Pemerintahan Nagari adalah kumpulan kesatuan masyarakat hukum adat di Wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari berbagai suku yang memiliki kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta memiliki perangkat dalam pemerintahan.. Selain sebagai unit regional, nagari juga merupakan unit genealogis. Dasar pemikiran utama dari nagari adalah kebebasan. Prasyarat

¹ Siti Hajar dkk., 2022, Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, , hlm. 137.

yang harus dimiliki nagari adalah nagari harus memiliki potensi aset tetap, SDM dan aset sosial lainnya agar nagari dapat mandiri dan otonom.²

Pada dasarnya, pemerintahan nagari dijalankan oleh seorang wali nagari yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di nagari. Seperti yang diungkapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 9 ayat 2, secara spesifik Pemerintahan Nagari dijalankan oleh Wali Nagari dan dibantu oleh perangkat nagari.³ Wali Nagari dipilih dan ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 12 ayat 1 dan 2.⁴

Wali nagari bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan kemajuan nagari karena memegang kekuasaan dalam struktur otoritas pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan atau kemunduran pembangunan nagari sangat bergantung pada seberapa baik wali nagari dan stafnya memberikan dampak pada daerah setempat untuk mengambil bagian dalam pembangunan nagari. Seorang wali nagari harus menjadi pelopor yang baik untuk memberikan dampak pada berbagai segmen di wilayah nagari.



² Yoserizal dkk. , Persepsi Pemerintahan Nagari Terhadap Proses Manajemen Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Lubuk Malako Solok Selatan, Administrasi Publik Universitas Andalas, Padang, hlm.1.

³ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari ,pasal 9 ayat 2.

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari ,pasal 12 ayat 1 dan 2 .

Wali nagari bukan hanya sekedar koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang hanya menangani masalah regulasi, tetapi wali nagari juga berperan dalam membina nagari dan mengupayakan bantuan pemerintah daerah setempat. Kewajiban wali nagari ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 11.⁵

Membahas tentang wali nagari tidak dapat dilepaskan dari tugasnya sebagai kepala pemerintahan nagari. Kepemimpinan merupakan hal yang paling menentukan perputaran dan kemajuan suatu lembaga atau organisasi. Dengan adanya otoritas yang tepat, maka akan berpengaruh terhadap kemajuan organisasi atau lembaga tersebut. Karena pemimpin diharapkan dapat menentukan visi dan tujuan organisasi, menugaskan dan memacu para anggota agar lebih terampil, mengkoordinasikan perubahan, dan membangun kerjasama yang baik dengan para pengikutnya untuk menentukan arah yang benar atau terbaik.⁶

Sejauh mana seorang pemimpin mengetahui situasi dan kondisi, serta aktivitas bawahannya, akan menentukan apakah mereka berhasil atau gagal dalam menyelesaikan kewajiban mereka. Setiap pemimpin memiliki cara-cara eksplisit dalam berperilaku dan pendekatan dalam menggerakkan yang mencerminkan bagaimana mereka melaksanakan kemampuan kepemimpinannya. Seperti yang dijelaskan oleh Wirawan, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh para pemimpin pelopor berdampak pada

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, pasal 11 .

⁶ Isnaini Muallidin, 2019, Kepemimpinan Transformasional dalam Kajian Teoritik dan Empiris, Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.1.

kepemimpinan mereka.⁷ Seperti yang diungkapkan oleh Thoha, gaya kepemimpinan seseorang adalah perilaku umum yang digunakannya untuk mempengaruhi perilaku orang lain.⁸

Kepemimpinan menjadi sangat penting dalam mengawasi kemajuan asosiasi dalam kondisi yang sering menghadapi perubahan yang tidak pasti. Seperti yang dikatakan oleh Lawler, perubahan yang masih meragukan ini membutuhkan pemimpin yang dapat membawa perubahan dengan memberikan perubahan dengan informasi yang lengkap dalam melakukan perubahan secara terstruktur. Salah satu model kepemimpinan yang tampak menjanjikan dalam menghadapi perubahan yang terus menerus terjadi di organisasi adalah kepemimpinan yang memiliki visi dan penguatan yang menunjukkan dampak positif adalah model kepemimpinan transformasional berdasarkan visi dan pemberdayaan yang telah menunjukkan efek positif.⁹

Istilah kepemimpinan transformasional pertama kali dicetuskan oleh James Mac Gregor Burns dan dikembangkan oleh Bernard M. Bass yang mengartikannya sebagai kemampuan untuk mendorong para pengikut untuk melakukan perubahan, serta meningkatkan kemampuan yang dipimpin. Konsep transformasional menunjukkan bahwa para pelakunya secara meyakinkan dapat merangsang dan memberikan inspirasi kepada anggotanya untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemimpin transformasional dapat

⁷ Insan H. Harahap, 2019, Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura menjadi Negara Maju, Jakarta, hlm. 2.

⁸ Ibid., hlm.2

⁹ Ibid., hlm.2

memberikan bantuan kepada individu-individu mereka untuk berkembang dan berkreasi dengan memberikan penguatan dan penyesuaian visi, misi, dan tujuan. Pemimpin transformasional dapat mendorong bawahannya untuk melihat bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sesuatu yang lebih besar daripada keuntungan mereka sendiri.¹⁰

Buntara di dalam buku Urip Triyono menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan transformasional akan berdampak pada hubungan antara atasan dan bawahan. Bawahan akan memiliki rasa percaya, hormat, bangga, tabah, dan menghargai atasan mereka dan dibujuk untuk mengurus bisnis dengan hasil yang melampaui tujuan yang telah diputuskan bersama. Jika kualitas dan nilai yang tinggi telah tertanam dalam diri setiap individu, maka kemajuan lembaga atau organisasi tidak akan sulit untuk dicapai.¹¹

Menurut Silalahi, ada dua model kepemimpinan pada sektor publik yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Lebih lanjut Silalahi menjelaskan bahwa kepemimpinan transaksional bergantung pada kekuatan regulasi dan integritas di dalam organisasi. Pemimpin transaksional menekankan pedoman kerja, tugas, dan usaha yang objektif, mereka juga umumnya akan memusatkan perhatian pada penyempurnaan



¹⁰ Urip Triyono, 2019, *Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan*, CV Budi Utama, Sleman, hlm. 97.

¹¹ Ibid.

tugas dan kepuasan perwakilan dan sangat bergantung pada penghargaan dan hukuman.¹²

Sedangkan kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang didasarkan pada kepercayaan bersama antara pemimpin dan yang dipimpin. Silalahi mengakui bahwa kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang memiliki manfaat untuk membangun kembali, menjaga dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Sehingga kepemimpinan transformasional lebih tepat untuk model kepemimpinan area publik.¹³

Pada periode yang sedang berlangsung saat ini, para pemimpin visioner telah muncul dengan bidang-bidang yang memiliki kemampuan yang serius untuk melakukan perubahan. Jika dilihat dari sudut pandang kepemimpinan, cara berperilaku para pemimpin visioner ini mencerminkan standar kepemimpinan transformasional. Oleh karena itu sangat menarik untuk membahas teori kepemimpinan transformasional dengan menyandingkan teori tersebut dengan fenomena kepemimpinan yang ada dalam realita sekarang ini.¹⁴



Menarik membicarakan kepemimpinan transformasional khususnya pada pemerintahan desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling dasar di Indonesia. Pemerintah desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang paling

¹² Abdul F. Yuni dkk., 2020, *Kepemimpinan Transformasional sektor publik*, hlm.3

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

dekat dengan masyarakat memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan memiliki kewajiban untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tentram, aman, dan damai.¹⁵ Kesadaran kepala kota sebagai kepala pemerintahan kota atau penyelenggara pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangan pemerintahan desa adalah sebagai pemimpin pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan serta pembinaan pemerintahan desa. Kewajiban pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan wilayah, dan penguatan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melaksanakan kewajiban pemerintah desa yang dimaksud.¹⁶

Sebagai seorang pemimpin kepala desa memiliki kewajiban yang besar dalam hal kemajuan desa atau nagarnya. Dengan demikian, dibutuhkan seorang kepala desa yang memiliki gaya kepemimpinan yang dapat secara tegas mempengaruhi pengelolaan daerah yang dipimpinnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berdampak pada hubungan antara atasan dan bawahan. Kepemimpinan transformasional mendorong para bawahan untuk mengerahkan energi tambahan dan mencapai apa yang dianggap dapat dicapai. Jika kualitas dan struktur nilai telah tertanam kuat dalam diri setiap

¹⁵ Sugiman, op.cit., hlm.83.

¹⁶ Ibid., hlm 91

individu, kemajuan organisasi atau lembaga tidak akan sulit untuk dicapai. Dapat dikatakan bahwa, dengan adanya hubungan yang baik antara seorang pemimpin dengan bawahannya, maka akan berdampak baik bagi organisasi atau lembaga yang dijalankan.¹⁷

Tantangan menjadi seorang pemimpin muncul karena fakta bahwa seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting. Pemimpin yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik akan membawa keberhasilan bagi organisasi dan lembaga yang dipimpinnya. Kepemimpinan transformasional memiliki model perilaku yang dapat dijadikan contoh bagaimana seorang pemimpin melaksanakan kepemimpinannya untuk bawahannya.¹⁸ Berbicara mengenai pola perilaku kepemimpinan transformasional, banyak ahli yang merumuskan tentang pola perilaku ini, seperti menurut James Mac Gregor Burn , Bernard M. Bass dan Riggio.

Dari berbagai rumusan yang telah dijabarkan oleh para ahli di atas dengan menjelaskan pola perilaku kepemimpinan transformasional tersebut, pendapat dari Bernard M. Bass dan Riggio lebih kompleks dibandingkandengan perumusan dari James Mae Gragor Burn karena lebih bersifat umum dan relevan terhadap berbagai lembaga maupun organisasi. Artinya pola perilaku kepemimpinan transformasional yang dirumuskan oleh Bernard M. Bass dan Riggio merupakan pola perilaku kepemimpinan transformasional

¹⁷ Triyono, op.cit., hlm. 97.

¹⁸ Ibid., hlm. 97

yang sudah mencakup semua hal dan harus dijalankan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya.

Pola perilaku kepemimpinan transformasional Bernard M. Bass dan Riggio ini tepat untuk digunakan sebagai patokan untuk menggambarkan kepemimpinan transformasional seorang pemimpin dalam melaksanakan kewajibannya. Pertama, *charisma* atau *idealized influence* (pengaruh ideal) yaitu cara berperilaku dari seorang pemimpin yang membuatnya dihargai sehingga para pengikutnya mengagumi, memuji, mengikuti, dan meniru. Kedua, *inspirational motivation*, yaitu perilaku pemimpin menjelaskan mimpi yang memberi energi dan membangkitkan para pengikutnya. Ketiga, *intellectual stimulation*, yaitu pemimpin akan menghadapi tantangan dan meminta pendapat para pengikutnya, membangkitkan semangat, dan mendayagunakan kreativitas para pengikutnya. Keempat, *individualized consideration or individualized attention* yaitu, pemimpin dapat diandalkan untuk hadir ketika para pengikutnya sedang membutuhkan bantuan, pemimpin ini bertindak sebagai pembimbing, memperhatikan masalah dan kebutuhan para pendukungnya, termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dan menghargai kontribusi setiap individu terhadap organisasi.¹⁹



Menarik membicarakan kepemimpinan transformasional khususnya dalam membahas pola perilaku dari kepemimpinan transformasional. Pentingnya perilaku dari seorang pemimpin yang mampu memberikan

¹⁹ Bernard M. Bass, 2008, *Transformational Leadership Second Edition*, Taylor & Francis e-Library, hlm.6.

motivasi serta inspirasi bagi bawahannya agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan dari organisasi dan lembaga yang dijalankan serta sifat kharismatik dari seorang pemimpin yang membuatnya dikagumi oleh bawahannya sehingga tujuan dari organisasi atau lembaga dapat terwujud.

Terdapat beberapa penelitian tentang kepemimpinan transformasional dari pemerintahan daerah. Seperti penelitian dari Farah Nadia Rofifah yang berjudul *Gaya Kepemimpinan Transformasional dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kepemimpinan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini)*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan transformasional mampu mengubah *mindset* bawahannya agar bertambah baik dalam memberikan pelayanan.²⁰ Selanjutnya penelitian dari Oktria Felinda tentang *Analisis Gaya Kepemimpinan Politik Mahyeldi Ansharullah Sebagai Walikota Padang Periode 2014-2019*. Penelitian ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan politik yang diterapkan oleh Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang adalah sebagai walikota, Mahyeldi berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan hubungannya dengan pegawai pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kinerja untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.²¹



²⁰ Farah Nadia Rofifah, *“Gaya Kepemimpinan Transformasional Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kepemimpinan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini)”*, Universitas Brawijaya, Malang, 2018

²¹ Oktria Felinda, 2018, *“Analisis Gaya Kepemimpinan Politik Mahyeldi Ansharullah Sebagai Walikota Padang Periode 2014-2019”*, skripsi departemen ilmu politik, Universitas Andalas, Padang

Namun terdapat yang luput dari penelitian yang dilakukan peneliti di atas karena hanya fokus membahas gaya kepemimpinan transformasional dari seorang pemimpin dan lebih memfokuskan membahas tentang upaya peningkatan pelayanan publik. Maka perlu dilakukan penjelasan yang lebih mendalam tentang kepemimpinan transformasional dari seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya khususnya pada lembaga pemerintahan dengan melihat pola perilaku dari kepemimpinan transformasional dalam mewujudkan pembangunan.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang kepemimpinan transformasional yang ada pada seorang pemimpin khususnya di lembaga pemerintahan yaitu pemerintahan nagari. Fokus penelitian ini adalah membahas pola perilaku kepemimpinan transformasional yang dilihat dari fenomena menarik, yaitu kepemimpinan Zul Arfin sebagai Wali Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam periode 2017-2023 yang berhasil membawa Nagari Pasia Laweh memperoleh berbagai penghargaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola perilaku kepemimpinan transformasional yang relevan dengan fenomena penelitian menggunakan pola perilaku kepemimpinan transformasional menurut Bernard M. Bass dan Riggio.

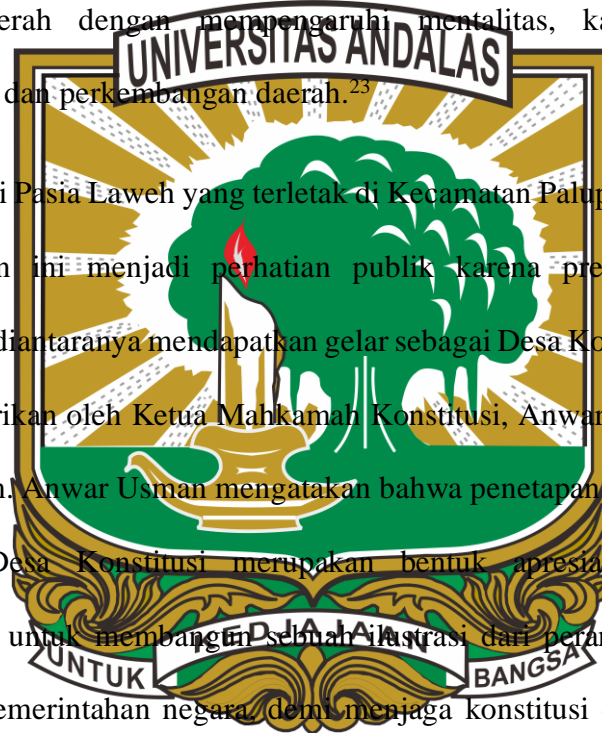
1.2 Rumusan Masalah

Kepemimpinan adalah bagian utama dari sebuah pemerintahan. Kepemimpinan sangat berpengaruh pada pembangunan. Salah

satu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah mampu menghadapi situasi berbeda, seperti politik, sosial, dan kemasyarakatan, baik di dalam organisasi atau lembaga maupun di dalam masyarakat.²²

Undang-undang otonomi daerah yang sedang berlaku memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk bertindak sebagai penguasa kecil di daerahnya sendiri dan menjalankan kekuasaan penuhnya. Kekuatan dan kekuasaan yang digerakkan oleh kepala daerah menunjukkan kualitas seorang kepala daerah dengan mempengaruhi mentalitas, karakteristik, sistem, kreativitas, dan perkembangan daerah.²³

Nagari Pasia Laweh yang terletak di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam belakangan ini menjadi perhatian publik karena prestasi yang berhasil diraihinya diantaranya mendapatkan gelar sebagai Desa Konstitusi di Indonesia yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman pada Tahun 2021 silam. Anwar Usman mengatakan bahwa penetapan Nagari Pasia Laweh sebagai Desa Konstitusi merupakan bentuk apresiasi dari Mahkamah Konstitusi untuk membangun sebuah ilustrasi dari perangkat terkecil dalam struktur pemerintahan negara, demi menjaga konstitusi dan falsafah negara. Nagari Pasia Laweh merupakan salah satu gambaran dari sebuah masyarakat hukum adat di daerah di Sumatera Barat yang mampu



²² Harahap, op.cit., , hlm. 2.

²³ Oktria Felinda , Analisis Gaya Kepemimpinan Politik Mahyeldi Ansharullah Sebagai Walikota Padang Periode 2014-2019.

menunjukkan kebenaran dan hakiki yang dapat membuktikan kebenaran konstitusional dari Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945.²⁴

Selain mendapatkan gelar Desa Konstitusi, Nagari Pasia Laweh juga berhasil juara 1 Lomba Nagari/Desa Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 silam. Prestasi ini berkat keberhasilan Nagari Pasia Laweh dalam melakukan pelayanan pemerintahan, penerapan aplikasi digital, inovasi ekonomi, dan penanganan Covid-19 berbasis kaum. Lebih lanjut, Nagari Pasia Laweh juga memenuhi syarat untuk mewakili Sumatera Barat dalam Lomba Desa / Nagari Berprestasi tingkat nasional.²⁵

Prestasi yang telah diraih Nagari Pasia Laweh tentunya tidak akan dapat diraih dengan cara yang mudah. Diperlukan proses, usaha dan kerja keras dalam mencapainya. Adanya peran pemimpin yang mampu menata, mengelola dan memimpin para bawahannya agar setiap program kerja yang telah dirancang mampu berjalan secara optimal. Hal ini dilakukan oleh Zul Arfin melalui gaya kepemimpinannya dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Wali Nagari Pasia Laweh periode 2017-2023 sehingga Nagari Pasia Laweh sukses meraih prestasi dan penghargaan dari berbagai sektor. Berikut data prestasi Nagari Pasia Laweh di bawah kepemimpinan Zul Arfin:



²⁴ Mahkamah Konstitusi. Pasia Laweh Menjadi Contoh Penegakan Konstitusi dan Ideologi Negara. (<https://www.mkri/index.php?page=web.Berita&id=17505&menu=2>) . Diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

²⁵ Sumbarprov.go.id. Pasia Laweh Juara 1 Lomba Nagari/Desa Tingkat Sumbar. (<https://sumbarprov.go.id/home/news/20499-pasia-laweh-juara-1-lomba-nagari-desa-tingkat-sumbar-2021>). Diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

Tabel 1.1

**Penghargaan / Prestasi yang Dicapai Nagari Pasia Laweh Masa
Kepemimpinan Zul Arfin DT Parpatiah**

No	Prestasi/Penghargaan	Tahun
1	Penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia atas kesuksesan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	2020
2	Penghargaan sebagai Desa Pancasila	2022
3	Juara I pada Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	2021
4	Penghargaan dari Mahkamah Konstitusi sebagai Desa Konstitusi Tahun 2021	2021
5	Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai Juara I Program PPKM Berskala Mikro	2021
6	Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi sebagai Peringkat I Nagari Tageh / Kampung Tangguh Nusantara untuk Nagari, Desa, dan Kelurahan di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat	2021
7	Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat atas Partisipasi dan Prestasi sebagai Terbaik III untuk Kategori Lembaga Pengelolaan Hutan Desa/ Nagari dalam Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumatera Barat	2020
8	Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Agam atas keberhasilan dalam Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan Tahun 2019	2019
9	Juara II Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Tingkat Provinsi Sumatera Barat	2020

Sumber : Data Sekunder Laporan Kumpulan Daftar Prestasi Nagari Pasia Laweh dari Tahun 2019-2021



*Sumber : Postingan pada Website Resmi Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
:Penguakuan Nagari Pasia Laweh Sebagai Desa Konstitusi*



*Sumber : Postingan Portal Resmi Provinsi Sumatera Barat, Pasia Laweh Juara 1
Lomba Nagari/Desa Tingkat Sumbar 2021*

Selain prestasi di atas, Nagari Pasia Laweh juga memiliki berbagai program yang ditujukan dalam rangka pembangunan nagari. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek sosial antara lain bidang pertanian dan kehutanan, bidang pendidikan, bidang pangan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang agama, serta bidang pembangunan. Salah satu program unggulan adalah

Program Kelompok Tani Hutan Berbasis Kaum. Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Berbasis Kaum ini didasari oleh kondisi pengelolaan kawasan hutan yang sudah diperoleh melalui SK HPHN.

Pembentukan Kelompok Tani Hutan Berbasis Kaum ini juga didasari bahwa di Nagari Pasia Laweh adat dan budaya masih terpelihara dengan baik dibuktikan dengan adanya hubungan baik antara niniak mamak dengan kemenakan. Peran niniak mamak di dalam sebuah kaum sangatlah kuat sehingga menjadikannya sebagai pemimpin kaum tersebut. Sesuai dengan program Kelompok Tani Hutan Berbasis Kaum ini memberikan kedudukan bagi niniak mamak sebagai ketua dari setiap kelompok tani hutan yang ada di Nagari Pasia Laweh. Kelompok Tani Hutan Berbasis Kaum ini tercatat sebanyak 65 kelompok tani yang diketuai oleh 65 orang niniak mamak. Dengan adanya program Kelompok Tani Hutan Berbasis Kaum ini setiap kaum mempunyai hutan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan khususnya oleh anak kemenakannya.

Sebagai wali nagari, Kerdiajiken dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki sifat tegas, kharismatik, serta visioner yang memiliki berbagai inovasi disandingkan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat membantu bagi kehidupan masyarakat. Salah satu inovasi yang menghantarkan Nagari Pasia Laweh mendapatkan penghargaan sebagai Nagari Tageh adalah dengan adanya Program Penanganan Covid-19 Berbasis Kaum. Dengan program ini, Pemerintah Nagari Pasia Laweh berhasil menciptakan inovasi Rumah Sehat Berbasis Kaum. Rumah Sehat Berbasis Kaum ini berhasil menjadi cara

alternatif dari pemerintah nagari dalam menyiasati terbatasnya fasilitas untuk menampung masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19. Pembiayaan dari Rumah Sehat Berbasis Kaum ini dibiayai sepenuhnya secara gotong royong oleh anggota suku, baik yang berada di kampung maupun di perantauan. Dengan program ini terbukti bahwa adanya kerja sama yang baik antara pemerintah nagari dengan masyarakat yang memiliki kesadaran sebagai makhluk sosial.

Selain itu, di bidang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai wali nagari, Zul Arfin berhasil menerapkan aplikasi digital dalam pelayanan publik. Hal ini membuktikan bahwa sebagai pemerintahan yang paling dasar di sistem pemerintahan di Indonesia, tidak menutup kemungkinan sebagai pemerintahan nagari mampu menggunakan kemajuan teknologi yang berguna untuk membantu proses jalannya pemerintahan. Penggunaan aplikasi digital ini ditujukan untuk memudahkan Pemerintahan Nagari Pasia Laweh dalam melakukan pelayanan publik, pengelolaan transparansi dana desa, dan pengoptimalisasian potensi wisata dan pertanian.

Selain inovasi inovasi di atas masih banyak berbagai inovasi yang dilakukan oleh Zul Arfin sebagai wali nagari dalam memajukan dan membangun nagari. Dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Zul Arfin sebagai wali nagari mampu membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat nagari. Di Sumatera Barat terdapat ratusan pemerintahan nagari yang tersebar di setiap kabupaten yang ada. Namun, dari ratusan nagari tersebut, hanya

sedikit pemerintahan nagari yang berhasil menjalankan tugasnya dalam segala aspek yang ditujukan untuk memajukan dan membangun nagari.

Nagari Pasia Laweh membuktikan bahwa sebagai pemerintahan terdekat dengan masyarakat, pemerintah nagari berhasil mengayomi dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat nagari demi mewujudkan kemajuan nagari. Sebagai seorang pemimpin, Zul Arfin mampu melaksanakan tugasnya dengan berbagai inovasi yang ia miliki. Terbukti, di bawah kepemimpinannya, Nagari Pasia Laweh berhasil meraih berbagai penghargaan yang disebabkan oleh berbagai inovasi yang ada.

Zul Arfin sebagai pemimpin politik, dimana Nagari Pasia Laweh meraih berbagai prestasi dan penghargaan serta pembangunan atau inovasi yang dilakukan di masa kepemimpinannya sebagai wali nagari, tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi juga ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kepemimpinan politiknya, hal ini memunculkan rasa ingin tahu peneliti terhadap gaya kepemimpinan politik yang diterapkannya dalam mengelola, mengendalikan dan memberdayakan pegawai pemerintahan Nagari Pasia Laweh agar mendukung setiap program kebijakan yang tertuang dalam visi pembangunan Zul Arfin sebagai wali nagari periode 2017-2023.

Dalam penelitian ini sesuai dengan data yang ada tentang prestasi dan inovasi yang ada di Nagari Pasia Laweh di bawah kepemimpinan Zul Arfin, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mampu menjelaskan kepemimpinan Zul Arfin sebagai wali nagari. Indikasi Zul Arfin



menerapkan kepemimpinan transformasional dapat dilihat adanya peningkatan pembangunan atau inovasi serta berbagai prestasi yang ada di Nagari Pasia Laweh di bawah kepemimpinannya sebagai wali nagari.

Seperti yang dijelaskan di atas, prestasi serta pembangunan yang ada di Nagari Pasia Laweh tentu tidak terlepas dari kinerja Zul Arfin sebagai wali nagari dengan para bawahannya. Sesuai dengan konsep kepemimpinan transformasional yaitu para pemimpin yang mampu memberikan motivasi terhadap bawahannya agar mampu bekerja sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan bersama demi mewujudkan kemajuan bagi organisasi atau lembaga yang dijalankannya, maka konsep dari kepemimpinan transformasional sangat melekat dengan gaya kepemimpinan Zul Arfin.

Hal ini lah yang membuat peneliti ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang kepemimpinan dari Zul Arfin sebagai Wali Nagari Pasia Laweh. Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, melihat berbagai prestasi, penghargaan, inovasi, serta pembangunan yang berhasil diraih dan dilaksanakan di Nagari Pasia Laweh, maka kepemimpinan Zul Arfin sebagai wali nagari, peneliti berusaha melihat bagaimana sikap dan kepemimpinan seorang pemimpin yang dapat membantu dalam hal pembangunan nagari.

Pada penelitian ini, peneliti berkaca kepada gaya kepemimpinan transformasional yang dinyatakan sebagai gaya kepemimpinan terbaru dan mampu membuat organisasi publik menuju perubahan yang lebih baik. Penelitian ini berfokus pada gaya kepemimpinan Zul Arfin dengan melihat



pada konsep kepemimpinan transformasional yang menjadi dasar acuan bagaimana Zul Arfin dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali nagari. Konsep kepemimpinan transformasional sangat penting untuk dibahas terutama mengkaji bagaimana pemerintahan desa/nagari sebagai pemerintahan paling dasar dalam menjalankan tugasnya demi memajukan kehidupan masyarakat. Terlebih lagi, dalam masa sekarang, masih banyak pemerintahan nagari yang belum secara baik melakukan tugasnya dalam hal mensejahterakan dan membangun kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan konsep kepemimpinan transformasional ini diharapkan Pemerintahan Nagari Pasia dibawah kepemimpinan Zul Arfin sebagai wali nagari dapat menjadi rujukan bagi nagari-nagari lain yang ada di Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya dalam hal membangun kehidupan masyarakat nagari. Dari pemaparan diatas, maka muncul pertanyaan penelitian Bagaimana *best practice* kepemimpinan transformasional dari Zul Arfin sebagai Wali Nagari Pasia Laweh periode 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah menjelaskan dan menganalisis gaya kepemimpinan Zul Arfin sebagai Wali Nagari Pasia Laweh dalam melakukan pembangunan nagari dengan menggunakan *best practice* kepemimpinan transformasional yang berfokus pada pola perilaku kepemimpinan transformasional menurut Bass dan Riggio.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan pengetahuan dalam bidang ilmu politik yaitu pengetahuan tentang kepemimpinan transformasional, khususnya yang berkaitan dengan pola perilaku kepemimpinan transformasional menurut Bernard M. Bass dan Riggio yaitu , *charisma* atau *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration or individualized attention* ,sertapenelitian ini juga dapat dijadikan bahan kajian dalam penelitian selanjutnya terkait menganalisis gaya kepemimpinan transformasional dari pemimpin organisasi atau lembaga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan mengenai kepemimpinan transformasional khususnya tentang pola perilaku kepemimpinan transformasional kepada para pemimpin lembaga atau organisasi, serta dapat menjadi acuan bagi para pemimpin lembaga atau organisasi agar lebih bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik demi mewujudkan cita-cita dari lembaga atau organisasi yang dipimpin.

